



Moratorium Hotel Bisa Diperpanjang

Kawasan Akses Jalan di Wilayah Borobudur Ditingkatkan

YOGYAKARTA, KOMPAS — Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan, kebijakan moratorium atau penghentian sementara pembangunan hotel baru kemungkinan akan diperpanjang. Namun, Pemerintah Kota Yogyakarta belum memutuskan berapa lama masa perpanjangan karena harus berkonsultasi dengan pihak terkait.

"Ya, memang rencananya demikian (moratorium hotel diperpanjang), tetapi jangan tanya dulu sampai kapan," kata Haryadi Suyuti, Senin (16/10), di Yogyakarta.

Kebijakan moratorium pembangunan hotel diberlakukan di Yogyakarta mulai tahun 2014. Kebijakan itu ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Perwal itu menyatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menghentikan sementara penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) hotel mulai 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2016.

Pada tahun 2016, Pemkot Yogyakarta memutuskan memperpanjang kebijakan moratorium itu hingga 31 Desember 2017. Perpanjangan diatur dalam Perwal Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016, yang ditandatangani Haryadi, 30 September 2016. Sesuai dengan Perwal No 55 Tahun 2016, kebijakan moratorium hotel di Kota Yogyakarta saat ini masih berlaku hingga 31 Desember 2017.

Ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI DIY Istidjab Danunagoro menyatakan, pihaknya berharap kebijakan moratorium diperpanjang karena tingkat keterisian belum ideal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata okupansi hotel berbintang di DIY Januari-Agustus 2017 hanya mencapai 57 persen. Sementara hotel nonbintang di DIY periode sama 32 persen.

Ditingkatkan

Pemerintah pusat meningkatkan akses infrastruktur sepanjang 1,5 kilometer dari wilayah Mungkid menuju Kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selain mengoptimalkan akses pariwisata

ta juga untuk mendukung rencana pelebaran jalan dari Bandara Kulonprogo, Yogyakarta, ke Borobudur.

Pejabat Pembuat Komitmen Parakan-Secang-Batas DIY Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Jateng, Kementerian PUPR, Edy Saputra, dihubungi dari Semarang, Senin (16/10), mengatakan, progres pelebaran jalan yang dimulai pada awal 2017 sudah mencapai sekitar 90 persen.

Kendati demikian, secara umum, pengerjaan jalan dengan anggaran Rp 27,6 miliar itu sudah selesai. "Akhir bulan ini akan dilaksanakan serah terima pekerjaan antara PPK dan kontraktor," kata Edy.

Terkait rencana pelebaran jalan Kulon Progo-Borobudur, Edy belum mengetahui letak persisnya, tetapi pasti mendukung rencana tersebut.

Dua rute

Pemerintah DIY Yogyakarta, mengusulkan dua rute untuk meningkatkan akses dari bandara baru di Kabupaten Kulon Progo menuju kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Peningkatan akses dilakukan dengan memperlebar jalan yang sudah ada hingga mencapai 15 meter.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Hananto Hadi Purnomo, dua rute yang disiapkan sebagai penghubung Bandara Kulon Progo dengan kawasan Borobudur adalah jalur Nanggulan dan jalur Menoreh.

"Kedua jalur ini yang akan kita dorong untuk menghubungkan bandara dan Borobudur. Kalau kedua jalur ini ditingkatkan, obyek-obyek wisata lain yang dilewati rute ini bisa ikut berkembang," ujar Hananto.

Jalur Nanggulan memiliki panjang rute 45 kilometer (km). Jalur ini menghubungkan bandara dengan kawasan Borobudur melalui sejumlah titik strategis yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo, antara lain Kecamatan Wates sebagai ibu kota kabupaten, kawasan industri di Kecamatan Sentolo, hingga tempat wisata *rafting* Sungai Progo di Kecamatan Kalibawang.

Sementara jalur Menoreh memiliki rute yang lebih panjang, mencapai 61 km. Di sepanjang jalur ini terdapat sedikitnya lima obyek wisata Kabupaten Kulon Progo yang berpotensi turut berkembang seiring dengan adanya peningkatan jalur.

(HRS/DIT/DIM)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005